

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI PKPU (STUDI KASUS NO. 26/PDT.SUS PEMBATALAN PERDAMAIAN/2024/PN NIAGA JKT.PST)

SUSMITHA AULIA

243305821003

Terjadiya eskalasi signifikan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada periode 2021-2025 merupakan representasi dari dinamika ekonomi makro di Indonesia. Fenomena tersebut terverifikasi melalui data statistik yang menunjukkan lonjakan dari 732 perkara di tahun 2021 mengalami kenaikan yang berkelanjutan sampai tahun 2025. Objek utama penelitian ini ialah menganalisis peran strategis Notaris selaku pejabat umum dalam memformulasikan akta perjanjian perdamaian PKPU, dengan fokus pada Putusan NO. 26/PDT.SUS PEMBATALAN PERDAMAIAN/2024/PN NIAGA JKT.PST yang melibatkan PT. Selaras Mitra Sejati. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini membedah batasan tanggung jawab Notaris menggunakan Teori Pembuktian, Teori Kewenangan, dan *Official Liability Theory*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris memegang tanggung jawab formal-administratif yang menuntut presisi tinggi demi mengantisipasi *error in persona*. Meskipun wanprestasi debitor yang berujung pada pembatalan perdamaian mengakibatkan kepailitan demi hukum. Namun tidak mendegradasi otentisitas akta perdamaian tidak serta merta gugur selama syarat Pasal 1896 KUHPerduta tetap dipenuhi. Sebagai langkah perbaikan regulasi, penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan yang melegalkan modifikasi akta perdamaian setelah tahap homologasi guna memberikan ruang adaptasi hukum, serupa dengan paradigma *Chapter 11* di yurisdiksi Amerika Serikat.

Kata Kunci : PKPU, Notaris, Akta Perdamaian, Homologasi, Tanggung Jawab Hukum.